BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Bank Indonesia Bandung

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam UU no. 23 tahun1999. Bank Indonesia bertujuan tunggal mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah bank Indonesia juga menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, karena ekonomi yang sehat membutuhkan uang beredar yang cukup agar tidak terjadi inflasi atau deflasi. Bank Indonesia memiliki perwakilan di beberapa kota, termasuk di Bandung, Dari zaman penjajahan belanda hingga sekarang perkembangan kantor Bank Indonesia Bandung sudah melalui beberapa periode.

2.1.1 Periode De Javasche Bank Agentschap Bandoeng

Pendirian Kantor Bank Indonesia Bandung atau dulu bernama *De Javasche Bank Agentschap* Bandoeng berawal dari adanya kekhawatiran pihak Afrika Selatan pada awal abad ke – 20. Tentang munculnya Inggris yang menjadi negara *super power*, terutama armada lautnya dipandang sebagai ancaman yang sewaktu – waktu dapat melakukan serangan ke seluruh koloni Belanda. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan antara Presiden *De Javasche Bank* ke – 10 J. Reijsenbach dengan pemerintah Hindia belanda, dilakukan upaya pengamanan

kekayaan bank dari daerah pantai ke pedalaman dan Bandoeng dianggap sebagai lokasi yang tepat bagi penyimpanan kekayaan bank tersebut.

Keinginan membangun kantor *De Javasche Bank Agentschap* Bandoeng dilaporkan kepada Dewan Militer dan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1902. Selanjutnya keinginan tersebut ditanggapi oleh Sekretaris Pertama Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1903, serta mengharapkan kesediaan Direksi untuk menanggung biaya-biaya pendirian kelak ketika kantor cabang ini mulai memperoleh keuntungan. Pelaksanaan pembangunan sempat mengalami penundaan 3 tahun karena pertimbangan telah didirikannya kantor cabang *De Nederlandsche Handlesbank* (sekarang Bank Mandiri) pada tahun 1903.

Persetujuan pendirian *De Javasche Bank Agentschap* Bandoeng dimulai setelah didkeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 44 tanggal 9 Desember 1908. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 1909 *De Javasche Bank Agentschap* Bandoeng resmi dibuka, meskipun masih menggunakan gedung sementara. Gedung *Agentschap* Bandoeng sendiri baru mulai dibangun secara permanan tahun 1915. Pada tanggal 5 Mei 1918, yaitu pada masa kepemimpinan L.W. Ven Suchtelen, pembangunan dinyatakan selesai dan mulai digunakan.

2.1.2 Masa Pendudukan Jepang

Gedung kantor di jalan Braga digunakan *De Javasche Bank Agentschap* Bandoeng hingga tahun 1942, yaitu pada masa penjajahan Jepang dimulai. Tidak diketahui dengan pasti penggunaan atas gedung kantor tersebut pada masa itu.

Besar kemungkinan gedung digunakan sebagai salah satu kantor bank Jepang yang beroperasi pada masa itu (misalnya Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank, Mitsui Bank atau Nanpo Kaihatsu Ginko). Ketika Jepang menyerahkan pada sekutu tahun 1945, salah satu yang dilakukan pemerintah Belanda saat kembali ke Indonesia adalah mengaktifkan bank-bank belanda yang dilikuidasi pada masa pendudukan Jepang. Dalam rapat Direksi tanggal 9 Mei 1946, *De Javasche Bank Agentschap* Bandoeng dinyatakan dibuka kembali dengan tetap menggunakan gedung kantor semula.

2.1.3 Periode Bank Indonesia

Kehadiran *De Javasche Bank* di Indonesia berakhir pada tahun 1953, ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Gedung *De Javasche Bank* Agentschap Bandoeng digunakan sebagai gedung Bank Indonesia cabang Bandung. Dengan disahkannya UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, maka berakhirlah aktivitas komersial Bank Indonesia, yang dilakukan sejak jaman *De Javasche Bank*. Sejak saat itu Bank Indonesia berpran sebagai agen pembangunan disamping peran utamanya sebagai Bank Sentral.

Berkaitan dengan perannya yang baru itu, aktivitas Bank Indonesia semakin banyak dan beragam. Hal ini menyebabkan sarana pendukung yang digunakan pada waktu itu dirasakan kurang memadai. Untuk memenuhi sarana pendukung tersebut, maka pada tahun 1982 dilakukan renovasi gedung kantor yang memakan waktu sekitar 9 bulan, dengan melakukan penambahan ruang kerja dengan tidak mengubah sosok gedung asli, yaitu tambahan ruangan di lantai dua

seluas ± 400 meter persegi, sehingga luas kantor seluruhnya menjadi sekitar 800 meter persegi.

Sejak dikeluarkannya paket kebijakan tahun 1983, sektor perbankan nasional berkembang pesat. Di Jawa Barat kondisi ini menyebabkan timbulnya kebutuhan akan adanya koordinasi antar kantor Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat agar aktivitas perekonomian, khususnya sektor perbankan dapat berjalan lebih lancar. Sejalan dengan kepentingan ini, maka sejak tanggal 19 Maret 1986 Kantor Bank Indonesia Bandung ditetapkan sebagai koordinator kantor-kantor Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat (Tasikmalaya dan Cirebon). Fungsi koordinator ini pada tahun 1996 diperluas hingga meliputi wilayah Bandar Lampung, Palembang, dan Bangka Belitung. Kantor Bank Indonesia Bandung termasuk kedalam KBI kelas satu

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas KBI Bandung dalam perekonomian regional dan nasional, dirasakan daya tampung gedung lama sudah kurang memadai. Untuk itu, Direksi Bank Indonesia memutuskan untuk memperluas gedung Kantor Bank Indonesia Bandung. Perluasan bangunan baru tersebut menempati lahan seluas ± 13.730 meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 11.900 meter persegi yang terdiri dari 7 lantai.

DAFTAR NAMA – NAMA PEMIMPIN BANK INDONESIA BANDUNG

No	Nama	Periode Jabatan
1	**J.A. Sereh**	8 Januari 1958 s/d 18 Maret 1960
2	**R. Soejoto**	13 Juli 1965 s/d 20 Maret 1968
3	**M. Rifai**	18 Maret 1960 s/d 18 November 1960
		20 Maret 1968 s/d 3 Juli 1968
4	**R. Kardana hardjakoesoemah**	3 Juli 1968 s/d 4 Oktober 1969
5	**R. Sujanto**	18 November 1960 s/d 19 Januari 1962
6	**Wijardi**	4 Oktober 1969 s/d 1 April 1972
7	**R.J. Natalegawa**	19 Januari 1962 s/d 4 Oktober 1963
8	**Oesman Ibrahim**	26 Juni 1972 s/d 22 Juli 1976
9	**R. Dhoemadi Singowigoeno**	4 Oktober 1963 s/d 16 Juni 1964
10	**Suprapto Wijayasubrata**	22 Juli 1976 s/d 21 Juli 1979
11	**H.P. Toar**	16 Juni 1964 s/d 13 Juli 1965
12	**Masri Saleh**	21 Juli 1979 s/d 27 Juli 1983
13	**Tom Hartono**	21 Juli 1983 s/d
14	**Dr. Heru Soepraptomo**	27 Juni 1986 s/d 7 Juli 1988
15	**Soedarnindhito**	8 Juli 1988 s/d 24 Juli 1990
16	**Irfano Chamra**	1990 s/d 1994
17	**Bachrulkifli**	14 April 1994 s/d 11 Januari 1996
18	**Warsono Santoso**	11 Januari 1996 s/d 18 Mei 1998
19	**Abdul Salam**	18 Mei 1998 s/d 9 Agustus 2000
20	**Maskan Iskandar**	7 Agustus 2000 s/d Agustus 2001
21	**Djoko Sarwono**	10 Agustus 2001 s/d 15 Agustus 2003
22	**Ir. Irman Djaya Dalimi**	10 Agustus 2003 s/d 29 Juli 2004
23	**M. D. Soegiarto**	29 Juli 2004 s/d Sekarang

2.2 Tempat dan Kedudukan Bank Indonesia Bandung

Kantor Bank Indonesia Bandung berlokasi di Jl. Braga No. 108 Bandung 40111 Jawa Barat Indonesia.

2.3 Status dan Kedudukan Bank Indonesia Bandung

Bank Indonesia mempunyai status dan kedudukan sebagai lembaga Negara yang independen dan sebagai badan hukum.

2.3.1 Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang – undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang – undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang – undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia

berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

2.3.2 Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan – peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2.4 Bentuk dan Hukum Perusahaan

Pada dasawarsa 50 – an, Bank Indonesia banyak bertindak sebagai bank sirkulasi dan bank komersial. Kemudian tahun 1968 Bank Indonesia melepaskan fungsinya sebagai bank komersial dan mengembangkan fungsi sebagai bank sentral.

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan bagian dari pemerintah, Bank Indonesia adalah suatu lembaga Negara.

Sesuai dengan Persetujuan Bersama ketetapan undang – undang tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999

tentang Bank Indonesia yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

(3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang – undang ini."

Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2004 oleh Presiden Republik Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia tercantum dalam UU no. 14 tahun 1967 kemudian juga tercantum pada UU no. 13 tahun 1968. Kedudukan Bank Indonesia sejajar dengan kepala Negara atau kepala pemerintahan.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi atau Departemen Tempat Kerja Praktek

Pada pelaksanaan kerja praktek ini, penulis ditempatkan di divisi logistik yang termasuk pada bidang manajemen intern perusahaan. Bidang pekerjaan

divisi ini adalah Menyediakan alat-alat yang dibutuhkan oleh pegawai kantor, menatausahakan pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor, mesin-mesin, perabot, peralatan gedung kantor, serta merekapitulasi kegiatan dan anggaran sebagai acuan untuk pencapaian sasaran tahunan Kantor Bank Indonesia. Berikut uraian singkat tugas – tugas pokok seksi logistik :

1. Pengadaan barang dan atau jasa (termasuk jasa konsultasi).
2. Melakukan kerjasama dengan Bagian PrLJ dalam proses pengadaan dan penunjukan pihak III dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaaan gedung kantor, mesin-mesin, perabot dan peralatan.
3. Melaksanakan proses pengadaan dan penunjukan pihak III untuk pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pemeliharaaan gedung kantor, mesin-mesin, perabot dan peralatan gedung kantor (yang tidak memerlukan perancangan, standar dan diadakan secara berkala/rutin).
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan (termasuk addendum kontrak) dan penatausahaan pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor, mesin-mesin, perabot, peralatan gedung kantor.
5. Melaksanakan pemenuhan fasilitas (sarana dan prasarana) ruang kerja untuk satuan-satuan kerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan insedentil.
6. Mengadministrasikan gedung kantor, mesin-mesin, perabot dan peralatan gedung kantor.
7. Menilai kinerja pihak III/rekanan.

8. Melakukan pengendalian proyek-proyek gedung kantor di KBI yang bukan wewenang KBI.
9. Melakukan kegiatan anggaran spt bloking anggaran, menerbitkan SPM & LLG.

2.6 Misi, Visi, Tujuan Tunggal dan Sasaran Strategis Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai misi, visi dan sasaran strategis, sesuai dengan UU no. 23 tahun1999.

2.6.1 Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambunagan.

2.6.2 Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya (*kredibel*) secara nasional maupun internasional melaui penguatan nialai-nilai strategi yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2.6.3 Tujuan Tunggal Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini terlihat dalam 2 (dua) aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju

inflasi, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang tercermin dari perkembangan kurs Rupiah terhadap mata uang Negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas – batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mengembangkan tiga tugas yang juga dikenal sebagai Tiga Pilar Utama Bank Indonesia, yaitu :

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
3) Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, tercantum pada pasal 8 UU – Bank Indonesia.

2.6.4 Sasaran Strategis Bank Indonesia

Untuk mewujudkan Misi dan Visi, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategi jangka menengah panjang, yaitu :

1. Memelihara kestabilan moneter,
2. Memelihara kondisi keuangan BI yang sehat dan akuntabel,
3. Meningkatkan efektivitas manajemen moneter,
4. Meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan efektif untuk mendukung Sistem keuangan yang stabil,

5. Memelihara keamanan dan efesiensi sistem pembayaran,
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan '*Good Governence'*,
7. Memeperkuat organisasi dan mengembangkan SDM yang berkompetensi tinggi dengan dukungan Budaya kerja yang berbasis Pengetahuan,
8. Mengintegtrasikan transfortasi Bank Indonesia sejalan dengan Arah BI Tahun 2008.

2.7 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bank Indonesia terus – menerus mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika volume pekerjaan dan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Secara garis besar, struktur organisasi Bank Indonesia dibagi ke dalam empat sektor, yaitu moneter, perbankan, sistem pembayaran dan manajemen internal sebagai sektor pendukung.

2.7.1 Deskripsi Jabatan

Setiap Perusahaan atau lembaga pemerintahan pasti mempunyai Job description begitu juga dengan Bank Indonesia cabang Bandung yang mempunyai Job description sebagai berikut :

1. Kantor Bank Indonesia Bandung dipimpin oleh satu orang pemimpin Bank Indonesia, satu orang koordinator bidang, dan satu orang pengawasan Bank Eksekutif senior dengan jabatan atau tingkatan pegawai utama setingkat direktur.

2. Koordinator Bidang. seorang koordinator bidang yang membantu pemimpin BI membawahi tiga bidang yaitu : Bidang Ekonomi dan Moneter, Bidang Sistem Pembayaran, dan Bidang Manajemen Intern. koordinator bidang ini mempunyai tingkatan pegawai utama setingkat Deputi Direktur.
3. Pengawasan Bank Eksekutif Senior. Pemimpin BI juga dibantu oleh seorang pengawas Bank Eksekutif Senior yang membawahi dua tim pengawasan yaitu Tim Pengawas Bank Umum dan Tim Pengawas Bank Perkreditan Rakyat. Pengawas Bank Eksekutif senior juga mempunyai tingkatan pegawai utama setingkat Deputi Direktur.
4. Kepala Bidang. Kepala bidang bertugas untuk memimpin seksi-seksi yang berada dibidangnya. dalam hal ini terdapat lima kepala bidang yaitu :
    a. Kepala bidang Ekonomi dan Moneter yang membawahi tiga seksi, yaitu :
        - Kajian Ekonomi Moneter
        - Statistik dan Ekonomi Moneter
        - Pel. Kebijakan Moneter
    b. Kepala bidang Sistem Pembayaran yang membawahi empat seksi, yaitu :
        - Akunting
        - Kliring
        - Kas
        - Pengedaran

c. Kepala bidang Manajemen Intern yang membawahi tiga seksi, yaitu :
    - SDM
    - Logistik
    - SEKOPAM

d. Pengawas Bank Eksekutif untuk Bank umum.

e. Pengawas Bank Eksekutif untuk Bank Perkreditan Rakyat.

Jumlah bidang ini dibentuk berdasarkan aspek-aspek kegiatan BI. Ketiga kepala bidang ini memiliki tingkatan pegawai madya setingkat kepala bagian.

5. Ketua Tim Pengawas Bank Eksekutif. BI memiliki dua ketua tim pengawasan, yaitu Ketua Tim Pengawas Bank Eksekutif I dan Ketua Tim Pengawas Bank Eksekutif II. Ketua Tim Pengawas Bank Eksekutif I bertugas memimpin pengawasan terhadap Bank Umum, sedangkan Ketua Tim Pengawas Bank Eksekutif II bertugas memimpin pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat di Bandung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua ketua tim pengawasan ini mempunyai tingkatan pegawai pengawasan Bank Eksekutif.
6. Seksi-seksi pada Bank Indonesia. Terdapat sebelas seksi yang terdapat di BI, antara lain :
    a. Seksi Kajian Ekonomi dan Moneter, berada dibawah kepala bidang Ekonomi dan Moneter.
    b. Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter, berada di bawah kepala bidang Ekonomi dan Moneter.
    c. Seksi Kas, berada dibawah kepala bidang Sistem Pembayaran.

d. Seksi Pengedaran, berada dibawah kepala bidang Sistem Pembayaran.
e. Seksi Akunting, berada dibawah kepala bidang Sistem Pembayaran.
f. Seksi Kliring, berada dibawah kepala bidang Sistem Pembayaran.
g. Seksi Sumber Daya Manusia, berada dibawah kepala bidang Manajemen Intern.
h. Seksi Logistik, berada dibawah kepala bidang Manajemen Intern.
i. Seksi Sekretariat, Komunikasi dan Pengamanan, berada dibawah kepala bidang Manajemen Intern.
j. Seksi Administrasi dan Informasi Bank, berada di Pengawasan Bank Umum dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat.

7. Sub Tim Pengawasan Bank. Terdapat empat sub Tim Pengawasan Bank di BI Bandung, yaitu :
   a. Dua sub Tim Pengawasan Bank Umum yang terdiri sub Tim Pengawasan I Bank Umum dan sub Tim Pengawasan II Bank Umum.
   b. Dua sub Tim Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, yaitu sub Tim Pengawasan I Bank Perkreditan Rakyat dan sub Tim Pengawasan II Bank Perkreditan Rakyat.
8. Perpustakaan Mini Kantor BI Bandung terletak dilantai 1 dan merupakan bagian dari seksi Statistik Ekonomi dan Moneter. Di perpustakaan ini terdapat 5776 buah buku yang bebas dibaca oleh umum. Namun, yang dapat menjadi anggota hanyalah pejabat, staf dan pegawai kantor BI Bandung.